

## **BAHASA KORAN SEBAGAI BAHAN AJAR PEMBELAJARAN BAHASA** **Dadang S. Anshori**

**Abstrak.** Bahasa koran sering dianggap sebagai bahasa yang direndahkan. Anggapan ini bukan hanya hadir dari kalangan para pakar bahasa, juga dikalangan para jurnalis (wartawan). Bahasa koran bahkan dianggap sebagai “kambing hitam” penghancur bahasa. Anggapan rendahnya bahasa koran ini bersumber dari kenyataan bahwa bahasa koran seringkali tidak memperhatikan aspek kebahasaan. Bahasa koran ditulis untuk kepentingan bisnis media semata, tidak dalam rangka pembelajaran bahasa di masyarakat.

Anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Sebenarnya bahasa koran telah dipakai sebagai bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama di SLTP dan SMU. Secara umum, teks wacana dalam buku paket diambil (dikutip) dari koran. Di Perguruan Tinggi, bahasa koran menjadi satu ragam bahasa yang dipelajari mahasiswa agar mereka dapat menulis opini di koran atau majalah.

Tulisan ini disajikan dalam rangka memaparkan bagaimana posisi bahasa koran dalam pembelajaran bahasa. Dengan melihat data-data pertumbuhan media massa di tanah air, kita bisa menyimak betapa luasnya jaringan pembaca koran di tanah air dan betapa besarnya koran mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat kita. Dengan prinsip belajar dari sesuatu yang “buruk”, koran justru bisa dijadikan alternatif bahan ajar bagi para guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa.

**Kata Kunci:** Bahasa koran, jurnalistik, bahan ajar

### **PENDAHULUAN**

Saat ini kita sedang menghadapi gelombang besar informasi. Alfin Tofler (1989) menyebutnya sebagai abad informasi. Informasi menjadi fokus utama dan penentu pembangunan masyarakat di masa mendatang. Informasi pun telah membawa efek pembangunan sektor lainnya, terutama ekonomi. Bahkan ekonomi informasi telah menjadi bagian penting dari dunia pasar (kapitalisme) negara-negara maju. Joseph Strabhar dan Robert La Rose (1996) dalam *Communications Media in The Informations Society* menyebutkan menyebutkan bahwa pada 1980 hanya 3% orang Amerika yang bekerja di bidang pertanian, 20% bekerja di sektor industri, 30% bekerja di sektor jasa, dan sisanya 47% bekerja di sektor informasi.

Dalam bukunya *The Work of Nations*, Robert Reich (1991), Menteri Perdagangan pada masa pemerintahan Bill Clinton, mencatat pergeseran pekerjaan masyarakat Amerika sejak tahun 1980-an dari pekerja industri menjadi pekerja-pekerja informasi yang melibatkan penciptaan atau manipulasi informasi tingkat tinggi yang oleh Reich disebut sebagai analisis simbolis (*symbolic analysis*). Maka pantaslah apabila wartawan kenamaan, J. O'Neill berkata, “Dunia sekarang tidak bisa dibentuk kembali melalui kenang-kenangan masa lalu; tak ada putaran kembali pada jalan menuju masa depan,” Dahulu tidak ada jaringan global, tetapi sekarang seluruh dunia memahami kehebatannya. Para demonstran di Praha pada tahun 1988 memahaminya dengan sangat baik sebagaimana mereka meneriakkan kepada para polisi anti huru-hara: “Dunia melihat kamu semua.” (Wriston, 1996:vi)

Lebih lanjut Wriston (1996:139) menulis “Nyanyian masa lalu “kekuasaan rakyat” biasanya diikuti dengan kepalan tangan, telah menjadi bagian dari sejarah. Kegagalan model negara sosial telah terbukti. Ungkapan itu mungkin berasal dari perang Bolsheviks selama Revolusi Rusia, ketika slogannya berbunyi “Kekuasaan untuk orang-orang Soviet”. Di Amerika, pada tahun 1960-an slogan tersebut diubah menjadi “partisipan demokrasi”, dan orang menyukai slogan “Tom Hayden dari kelompok pelajar untuk demokrasi menyerukan pemindahan kekuasaan kepada rakyat”, yang mampu mengidentifikasi sebagai diri mereka sendiri. Setelah itu slogan

“kekuasaan rakyat” diadopsi oleh Bobby Seale sebagai nyanyian kelompok Black Panthers. Tak perlu dikatakan bahwa hal terakhir yang ada di kepala orang-orang ini adalah pemberian hak suara kepada semua negara dalam pemerintahan negara. Tetapi inilah yang terjadi sekarang.”

Hal penting dalam abad informasi adalah menyebarkan informasi melalui media cetak dan elektronik. Media cetak dan elektronik tumbuh subur bersama pertumbuhan ekonomi kapitalis. Di Indonesia kedua jenis media ini mengalami perkembangan yang pesat. Pada tahun 1900-an kita masih menyaksikan siaran tunggal TVRI dengan paradigma informasi yang di *setting* pemerintah. Kini anak-anak kita bisa menyaksikan 11 stasiun televisi (saat tulisan ini dibuat) dengan berbagai ragam acara mulai dari yang bermuatan pendidikan hingga yang paling “amburadul” dan merusak moral anak-anak kita.

Media cetak (koran, majalah, tabloid) di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan terhadap kebutuhan dunia informasi sekalipun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia masih belum memadai. Perbandingan televisi dan koran per seribu penduduk di beberapa negara sebagaimana ditunjukkan tabel berikut:

### Televisi dan Koran Perseribu Penduduk

Negara	Televisi	Koran
Indonesia	60	28
Filipina	48	54
Thailand	112	72
Malaysia	376	280
Brunai	233	38
Jepang	620	587
Amerika	815	250

Sumber: HDI, 1993

Di negara-negara Asia koran mengalami perkembangan yang pesat. Di Taiwan pada tahun 1987 hanya terdapat 31 penerbitan, pada tahun 1996 penerbitan dinegara tersebut menjadi 350 buah dengan sirkulasi lebih dari 6 juta eksemplar. Di Hongkongg sirkulasi surat kabar mencapai 4,8 juta eksemplar. Di Jepang dengan 122 penerbitan tercatat 53 juta eksemplar untuk 125 juta penduduk setiap harinya. Di negeri Gajah Putih, Thailand, beredar 41 surat kabar (tahun 1996) dedngan sirkulasi 4,8 juta. Di Indonesia jumlah penerbitan mengalami penurunan dari 84 penerbitan (1980) menjadi 76 penerbitan (1995), namun sirkulasinya meningkat empat kali lipat dari 2,3 juta (1980) menjadi 8,8 juta pada 1996 (*Pikiran Rakyat*, 21 Pebruari 1997).

Menurut BPS di Indonesia terbit sekitar 286 penerbitan pers; 2347 penerbitan nonpers; 116 percetakan pers, dan 6234 percetakan nonpers. Jumlah tiras penerbitan saat ini mencakup surat kebar harian sebanyak 4.691.313 eksemplar (75 buah atau 36,38%), surat kabar mingguan sebanyak 575.745 eksemplar (87 buha atau 30,38%), majalah tengah bulanan sebanyak 1.864.492 eksemplar (48 buah atau 14,65%), majalah bulanan sebanyak 705.492 eksemplar (48 buah atau 5,54%); majalah dwibulanan sebanyak 6.000 eksemplar, majalah tribulanan 6.000 eksemplar, serta bulletin sebanyak 14.054 eksemplar (*Suara Karya*, 4 Oktober 1994). Sumber daya pers berjumlah 6.287 orang dan dari jumlah tersebut 4.062 (64,04%) adalah mereka yang berlatar belakang pendidikan tinggi (Soebrata, 1995:4).

Potensi besar pers tidak mungkin dinafikan oleh dunia pendidikan, khususnya pendidikan bahasa. Pers telah memberi nuansa dan suasana kebahasaan yang lain dari kehidupan akademik. Pers telah membahasakan kebisuan di tengah-tengah realitas bahasa masyarakat. Dan tentu, bahasa pers adalah realitas yang harus dihargai apa adanya. Tampaknya pengakuan atas realitas bahasa pers sudah cukup memadai, namun dalam konteks ini, bagaimana bahasa pers ini bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan, bukan hanya secara informatif melainkan juga dari aspek bahasanya.

Pemikiran-pemikiran berikut merupakan penguatan terhadap perlunya bahasa pers dijadikan media dan bahasa ajar pembelajaran bahasa Indonesia.

## LANDASAN TEORETIS

Bahasa koran dikenal dengan istilah bahasa jurnalistik. Parni Hadi (1997) menyebutkan bahwa bahasa jurnalistik berpedoman pada bahasa Indonesia baku. Buruknya bahasa koran merupakan cermin buruknya bahasa birokrat, karena koran lebih banyak diisi oleh ucapan dan perkataan para birokrat. Bahasa para birokrat ini sering ditandai dengan banyaknya pemakaian akromin, terutama di kalangan militer yang menginfeliterasi media massa dengan sangat cepat dan luas. Bahasa pejabat juga ditandai dengan *eufimisme* dan pada gilirannya akan melahirkan “pemiskinan makna” (Lubis, 1978). *Eufimisme* kalau dikaji menurut teori Buhler termasuk dalam *appeal*, yaitu bahasa yang berisi perintah atau permintaan yang ditujukan pembicara kepada lawan bicara agar apa yang diminta atau diperintahkan dikerjakan oleh lawan bicara (Kleden, 1978:70).

Buruknya bahasa koran di satu sisi mendapatkan pemakluman oleh banyak pihak dan pada sisi lain menjadi alat legitimasi para wartawan untuk tidak memakai bahasa Indonesia baku (standar). Dalam perkembangannya, bahasa koran semakin jauh dari bahasa Indonesia baku dan membentuk “komunitas” bahasa tersendiri, dengan segala karakteristiknya. Buruknya bahasa koran disebabkan beberapa faktor. *Pertama*, berita di koran dikutip dari pembicaraan nara sumber yang kebanyakan pejabat yang kebanyakan dari mereka pemakaian bahasanya buruk. Sesungguhnya buruknya bahasa koran mencerminkan buruknya bahasa pejabat. *Kedua*, tidak semua wartawan mengerti pemakaian bahasa Indonesia yang baku. Untuk mendapatkan wartawan ekonomi, perusahaan koran tidak merekrut sarjana sastra yang sehari-harinya belajar bahasa, melainkan mengambil sarjana ekonomi yang tidak mengerti seluk beluk pemakaian bahasa. Pengetahuan bahasa diberikan melalui sebuah *training* wartawan yang dilakukan media tersebut. *Ketiga*, terbatasnya ruang dan waktu sehingga berita yang disajikan berprinsip asal informasi sampai (prinsip berita 5W dan H), tidak berpikir jauh tentang bagaimana struktur bahasa ditertibkan. Wartawan dikejar *deadline* berita karena mereka harus menyajikan berita setiap hari. Akhirnya ukuran “konvensi” bahasa koran adalah kelogisan dan inipun kadang-kadang dilanggar oleh para wartawan.

Unsur kelogisan dalam pemberitaan pun alih-alih menjadi alasan tidak menariknya sebuah berita. Banyak berita menarik karena dianggap tidak logis. Ketidaklogisan sebuah berita bisa dilihat dari isi (*content*) dan struktur bahasa. Tulisan ini tidak berkompeten dalam melihat kelogisan bahasa dan hanya ingin memusatkan pada kelogisan struktur bahasa yang dipergunakan.

Ragam bahasa jurnalistik memiliki ciri-ciri, yaitu bersifat sederhana, komunikatif, dan ringkas. Sederhana karena harus dipahami secara mudah; komunikatif karena jurnalistik harus menyampaikan berita yang tepat; dan ringkas karena keterbatasan ruang (dalam media cetak) dan keterbatasan waktu (dalam media elektronik). Dalam ragam bahasa jurnalistik ini awalan me- dan di- sering ditanggalkan, yang dalam penulisan berbahasa baku harus digunakan. Kalimat Gubernur tinjau daerah banjir dalam bahasa baku akan berbentuk Gubernur meninjau daerah banjir (Chaer dan Agustina, 1995:90-91).

Hassanudin memberikan uraian yang rinci tentang ciri-ciri bahasa jurnalistik, yaitu

- 1) Lugas, tidak mendua arti  
Bahasa yang dipergunakan wartawan harus lugas, artinya bahasa yang dipergunakan secara langsung pada sasaran makna yang ingin diungkapkan. Seorang wartawan harus menghindari menggunakan bahasa yang kemungkinan akan mempunyai banyak tafsir. Eufimisme relatif sering dipergunakan media massa Indonesia dan cenderung berlebihan harus dihindari para wartawan. Sama halnya dengan kata-kata yang ambigu harus dihindari pemakaiannya oleh para wartawan.
- 2) Sederhana, lazim, dan umum  
Media cetak dikonsumsi untuk segala lapisan masyarakat. Oleh karena itu, wartawan dituntut menyajikan berita yang sederhana, artinya menggunakan bahasa yang lazim dan diketahui

masyarakat umum. Dengan cara ini, bukan berarti bahwa wartawan kurang pengetahuan atau menganggap rendah pembacanya. Hal ini mengingat bahwa bahasa surat kabar harus dapat dibaca oleh semua kalangan dan semua jenjang usia.

- 3) Singkat dan padat  
Surat kabar memiliki keterbatasan teknis (ruang). Untuk itu bahasa yang dipergunakan harus singkat, tidak betele-tele, dan tidak berbelit-belit. Dalam menghasilkan berita yang singkat dan padat, wartawan biasanya menggunakan rumus 5W + H dalam menyusun berita.
- 4) Sistematis dalam penyajian  
Ciri ini bermaksud bahwa sebuah berita surat kabar harus kronologis, menyajikan keteraturan peristiwa dalam penulisan berita. Kesistematikan ini akan bermanfaat bagi pembaca untuk secepatnya mendapatkan informasi yang disampaikan surat kabar yang bersangkutan. Kesenambungan informasi menjadi hak pembaca dalam mengetahui sebuah peristiwa.
- 5) Berbahasa netral, tidak memihak  
Bahasa jurnalistik harus demokratis, bersifat netral, tidak membedakan posisi sumber berita. Wartawan harus menyajikan berita secara seimbang dan tidak tendensius.
- 6) Menarik  
Surat kabar dikonsumsi untuk dibaca masyarakat. Agar masyarakat mau membacanya, maka surat kabar itu harus menampilkan bahasa yang menarik dan merangsang minat baca. Menarik tidak berarti tendensius atau menyajikan gosip. Menyajikan berita dengan fakta yang jelas dan akurat adalah salah satu bagian yang menjadikan pembaca mau membaca berita tersebut.
- 7) Kalimatnya pendek  
Kalimat pendek dalam bahasa jurnalistik dimaksudkan agar pokok persoalan yang diungkapkan segera dapat dimengerti pembacanya. Kalimat pendek yang lengkap dapat mengungkapkan maksud penulis secara jelas. Upayakan untuk menghindari kalimat majemuk dalam penulisan berita.
- 8) Bentuk kalimatnya aktif  
Agar laporan atau berita itu menarik dan terasa hidup, maka kalimat aktif yang harus digunakan dalam menyajikan berita.
- 9) Menggunakan bahasa positif  
Bahasa positif lebih banyak diminati dibandingkan bahasa negatif. Dalam kegiatan jurnalistik bahasa positif bisa dijadikan agar pembaca tertarik membaca berita yang dituliskan wartawan.  
Menurut Goenawan Mohamad (1991:83) bahasa jurnalistik harus mengandung unsur hemat dan jelas. Penghematan diarahkan pada dua sasaran, yakni kata dan kalimat. Sementara kejelasan dilakukan dengan syarat: si penulis menguasai bahan yang akan dituliskannya; si penulis mempunyai kesadaran tentang pembaca.

Kehematan jurnalistik pada sasaran kata terlihat dalam hal-hal berikut:

- 1) Penghematan beberapa kata yang tidak mengubah arti.  
Contoh: *agar supaya, akan tetapi, apabila, sehingga, meskipun* dihemat menjadi *agar, supaya, tapi, bila, hingga, meski*.
- 2) Penghematan *daripada* menjadi *dari*, di luar kalimat yang menunjukkan perbandingan.
- 3) Penghematan huruf pada ejaan yang salah  
Contoh: *sjah, khawatir, ahli* menjadi *sah, kuatir, ahli*
- 4) Penghematan beberapa kata yang memiliki sinonim yang sama.  
Contoh: *kemudian, makin, terkejut, sangat, demikian, sekarang* menjadi *lalu, kian, kaget, Amat, begitu, kini*.

Beberapa penghematan kamilat dalam bahasa jurnalistik dilakukan pada:

- 1) Pemakaian kata *adalah, apa, dimana*, yang tidak perlu di awal kalimat.
- 2) Pemakaian kata Tanya di tengah kalimat.
- 3) Pemakaian *dari* yang merupakan terjemahan *of* dari bahasa Inggris.
- 4) Pemakaian *untuk* sebagai terjemahan *to* dari bahasa Inggris.
- 5) Pemakaian *adalah* sebagai terjemahan *is* dari bahasa Inggris.

- 6) Pemakaian *akan, telah, sedang*, sebagai penunjuk waktu.
- 7) Pemakaian *bahwa* sebagai bentuk tidak langsung.
- 8) Pemakaian *yang* sebagai kata sambung.
- 9) Penggunaan imbuhan.

Kejelasan dalam bahasa jurnalistik menurut Goenawan Mohammad (1991:90) terlihat dalam teknik komposisi:

- a) tanda baca yang tertib,
- b) ejaan yang tidak menyimpang dari sistem ejaan yang disempurnakan (EYD),
- c) pembagian tulisan secara sistematis dalam alinea.

Dua hal yang harus diperhatikan dalam praktek kejelasan, yakni

- 1) Berhemat dengan kata-kata asing  
Seorang wartawan harus memiliki kamus bahasa untuk memilih diksi (kata) yang sudah diindonesiakan. Pemakaian istilah asing yang berlebihan akan mempersulit pembaca.
- 2) Menghindari akronim  
Kita saat ini dibanjiri akronim yang berpola tidak sesuai dengan aturan pembentukan akronim. Akronim-akronim tersebut bukan hanya mengganggu, melainkan merusak aturan berbahasa tulis.

Menurut Ernest Hemingway yang ditulis ulang Rosihan Anwar (1991:12-15), ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam bahasa jurnalistik adalah

- 1) gunakan kalimat-kalimat pendek,
- 2) gunakan bahasa biasa yang mudah dipahami orang,
- 3) gunakan bahasa sederhana dan jenis pengutaraannya,
- 4) gunakan bahasa tanpa kalimat majemuk,
- 5) gunakan bahasa dengan kalimat aktif, bukan kalimat pasif,
- 6) gunakan bahasa yang padat dan kuat,
- 7) gunakan bahasa positif, bukan bahasa negatif.

### **Bahasa Koran dan Bahasa Penjulukan**

Menurut Ariel Heryanto (1989:15-16) bahasa Indonesia pada hakikatnya merupakan komoditas industrial. Bahasa tidak lahir dan tumbuh dari dinamika komunal masyarakat, tetapi merupakan produk rekayasa para profesional yang dirancang untuk dipasarkan secara massal. Bahasa ini bukan bahasa ibu bagi makhluk manapun di planet ini. Penutur bahasa ini hanyalah para konsumen yang hanya dapat bergantung pada sesuatu keputusan para pejabat “pembinaan dan pengembangan” bahasa sebagai komoditas, tidak aneh jika nilai bahasa ini dapat dihayati dengan jargon ekonomi. Bahasa Indonesia “yang baik dan benar” merupakan komoditi yang langka.

Politisasi bahasa yang paling kentara dan sering dipergunakan oleh penguasa dan masyarakat adalah penjulukan (*labeling*). Istilah ini bahkan dipergunakan sejak pemerintah Orde Lama dengan menyebut “anti revolusioner” kepada mereka yang menentang Presiden Soekarno. Pada masa Orde Baru muncul istilah-istilah *ekstrim kanan, ekstrim kiri, anti Pancasila, subversif, anti pembangunan, provokator, OTB, GPK* dll. Pada masa revolusi juga berkembang istilah-istilah *ninja, makar, fundamentalis, kelompok Islam, kelompok nasionalisme, kaukus* dll. Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid, adalah orang yang sering memberikan penjulukan pada suatu peristiwa, misalnya “Jenderal K” kepada dalang kerusuhan Ambon, atau “makar” kepada mantan Sekjen Dephutbun Suropto, walaupun kemudian meminta maaf kepada Suropto setelah dipertemukan oleh Sri Edi Swasono, Agus Miftach, dan Nurmahmudi Islam di kediaman Bung Hatta, 16 November 2001 (*Tempo*, 17 November 2001).

Penjulukan ini akan sangat kuat mempengaruhi persepsi dan pandangan umum dan merugikan pihak yang dijuluki. Kasus paling aktual adalah pembentukan opini kerusuhan yang dilakukan pendukung Inggris membuat panitia FIFA World Cup 2002 harus melakukan ekstra ketat pada pertandingan perdana kesebelasan Inggris, dan pihak panitia merasa lega ketika

kerusuhan tersebut tak kunjung tiba. Penjulukan serupa dialami oleh pendukung kesebelasan sepakbola asal Surabaya yang dikenal dengan nama “bonek”. Banyak pihak yang merasa dirugikan oleh julukan tersebut, karena terbentuk opini bahwa pendukung kesebelasan Surabaya adalah perusuh dan perusak fasilitas umum, terlebih apabila tim kesayangannya kalah. Apakah semua pendukung kesebelasan Surabaya perusuh? Tentu tidak, banyak di antara mereka yang baik-baik dan menjadikan sepakbola sebagai hiburan bukan media kerusuhan. Namun publik telah memberi “stempel” bahwa mereka perusuh dan perusak.

Deddy Mulyana (1999) memberikan beberapa contoh tentang pembentukan persepsi publik akibat penjulukan ini.

Juni 1997, di Kabupaten Purbalinga satu orang tewas dan empat orang luka parah akibat dikeroyok massa, karena mereka diisukan atau dijuluki “hantu pocong”. Padahal seperti dituturkan Kapolres Purbalingga, Letkol Pol. Imam Suwangsa, hantu pocong sendiri tidak terbentuk. Satu di antara keempat orang yang luka-luka kerena dianiaya itu adalah Siti Maemunah, yang seusai shalat Maghrib, berjalan kaki dengan tetap mengenakan mukena uyntuk mengunjungi saudaranya di Bojongsari.

Di Demak, Jawa Tengah, Kyai Rochmadi tewas dibantai massa karena diduga mempraktekkan ilmu santet (*Pikiran Rakyat*, 17 Oktober 1998). Sementara itu Serda Yunus Paribong, Serda Hariri dan Serda M. Dahlan tewas dikeroyok massa gara-gara diteriaki “ninja” oleh tersangka pelaku pencurian sepeda motor di Bangkalan, Madura, padahal mereka justru tengah mengejar pencuri tersebut (*Republika*, 2 November 1998).

Istilah “Orde Baru” adalah penjulukan yang terbentuk sangat kuat dan mempengaruhi opini publik. Mereka yang “Orde Baru” adalah yang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka yang memakan uang negara. Mereka yang merusak sistem bernegara dan mengacaukan perekonomian rakyat. Mereka yang rakus dan kenyang karena memakan uang rakyat. Mereka yang harus diadili dan dipenjarakan. Mereka yang tidak lagi mendapatkan maaf dari rakyat karena “dosa-dosanya”. Benarkan mereka yang berkuasa di zaman Orde Baru semuanya melakukan perbuatan di atas? Tentu tidak. Ada orang yang hidup di zaman orde baru dan menjadi penguasa tetapi tidak melakukan perbuatan di atas. Namun setiap kata “orde baru “ diteriakkan, mereka terbawa jelek dan ikut tercemari. Inilah efek dari “penjulukan” yang tidak bisa ditahan oleh “si korban”.

Penjulukan disampaikan melalui koran dengan menggunakan bahasa koran. Dalam pemberitaan dan penyebaran informasi, bahasa penjulukan memiliki muatan berita yang tak kalah menarik. Berbagai istilah di atas, tersebar sedemikian rupa karena koran membantu mensosialisasikan dan menginstitutionalisasikan bahasa-bahasa tersebut. Pesan yang terbentuk tidak terlepas dari *agenda setting* koran terhadap isu-isu tersebut. Koran melalui bahasanya bisa menjungkirbalikan mitos seakan-akan menjadi nyata, isu menjadi data, dan sesuatu yang misteri menjadi sesuatu yang nyata. Dalam beberapa hal, koran kadang-kadang telah lebih dahulu memberi batasan dan memberikan penilaian terhadap kasus atau sumber pemberitaan dengan tidak menghitung kerugian bagi pihak yang menjadi korban. Bahasa koran, dengan demikian, sebagaimana insan pers menjadi tidak netral.

## **BAHASA KORAN DALAM BUKU AJAR**

Bahasa koran dengan segala karakteristiknya kini mulai dipakai dalam buku ajar bahasa Indonesia. Bahasa koran/majalah secara teknis memang lebih mudah dikutip karena menggunakan bahasa yang sederhana dan pendek. Di samping itu, materi dalam koran/majalah lebih bervariasi daripada materi dalam buku yang hanya satu bidang informasi. Pertimbangan ini tampaknya yang dipilih pada penulis buku ketika menggunakan koran/majalah sebagai sumber wacana (teks) dalam buku ajar bahasa Indonesia.

Bahasa koran dalam buku teks mata ajar bahasa Indonesia ada yang ditulis utuh (apa adanya), ada yang sudah mendapatkan penyuntingan seperlunya, dan ada pula yang dirangkum ide dan gagasannya. Berbagai jenis wacana tersebut sangat bergantung pada kreativitas penulis buku ajar tersebut. Penulis buku yang kreatif tentu tidak akan mengambil teks koran secara utuh,

kecuali untuk kepentingan contoh (latihan). Bahasa koran bagaimanapun belum layak untuk dikatakan bahasa akademik (pedagogi).

Berdasarkan survei yang penulis lakukan pada teks (wacana) buku ajar bahasa Indonesia SMU *Laras Berbaso Indonesia* karangan Drs. Andoyo Sastromiharjo, M.Pd. dkk. ditemukan data sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Sumber Wacana Buku Ajar Kelas 1-A**

Tema	Sumber Wacana	
	Koran/Majalah	Buku/ Lain-lain
1. Kesusastaan	-	1
2. Keselaman dan Kesehatan Kerja	2	-
3. Teknologi	2	-
4. Pendidikan	-	1
5. Pertanian	1	-
6. Transmigrasi	-	2
7. Lingkungan	-	1
8. Peristiwa	-	1
9. Olahraga	-	1
Jumlah	5 (41,67%)	7 (58,33%)

Berdasarkan data di atas, 41,67% atau 5 dari 12 wacana (teks) buku ajar bahasa Indonesia diambil dari koran/majalah. Bahasa koran dipakai sebagai sumber mata ajar bahasa Indonesia pada tema keselamatan kerja, teknologi, dan pertanian.

**Tabel 2**  
**Sumber Wacan Buku Ajar Kelas 2-A**

Tema	Sumber Wacana	
	Koran/Majalah	Buku/ Lain-lain
1 Tempat Umum	2	-
2 Tranportasi	2	-
3 Peristiwa	3	-
4 Kegemaran	3	-
5 Kependudukan	1	1
6 Ekonomi	2	1
7 Ketertiban	3	1
8 Hiburan	2	1
9 Kepahlawanan	1	1
Jumlah	19 (79,13%)	5 (20,87%)

Dalam buku teks kelas 2-A, pemakaian bahasa koran sangat dominan (79,13%) atau sekitar 19 dari 24 teks. Seluruh tema dalam buku ajar bahasa Indonesia 2-A menggunakan koran/majalah sebagai sumber informasi (wacana).

**Tabel 3**  
**Sumber Wacana Buku Ajar Kelas 3-A**

Tema	Sumber Wacana	
	Koran/Majalah	Buku/Lain-lain
1. Kesenian	-	1
2. Kegemaran	1	-
3. Kependudukan	1	-
4. Teknologi	1	2
5. Pertahanan dan Keamanan	3	-
6. Kelautan	1	1
7. Lingkungan	-	2
8. Kegiatan	1	1
9. Peristiwa	1	1
Jumlah	9 (52,94%)	8 (47,06%)

Pada buku ajar kelas 3-A terdapat 9 teks (52,94% dari 17 teks yang berasal dari koran/majalah. Hal ini berarti lebih dari setengah wacana yang disajikan dalam buku ajar diambil dari koran/majalah. Wacana (teks) yang diambil dari koran/majalah di kelas 3-A bertema kegemaran, kependudukan, teknologi, pertahanan dan keamanan, kelautan, kegiatan, dan peristiwa.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan ulasan dan data survai di atas, bahasa koran telah menjadi media alternatif pembelajaran bahasa. Bahasa koran menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran bahasa. Bahasa koran bahkan telah menjadi bahasa pembelajaran. Oleh karena itu, sangat layak kalau kita menghitung keberadaan bahasa koran secara akademik. Bahasa koran sebagai sumber belajar yang ditinjau dari disiplin ilmu linguistik, baik structural maupun fungsional.

Sangat tidak wajar, apabila di zaman global kesejagatan ini, dunia akademik menghindari dari media dan mengenyampingkan media. Bagaimanapun bahasa koran/ majalah adalah bahasa realitas yang dipakai masyarakat kita. Koran hanya menyajikan bahasa-bahasa narasumber sebagaimana adanya. Maka, buruknya bahasa koran/majalah sebenarnya memberikan indikasi buruknya bahasa para pejabat kita yang menjadi narasumber koran/majalah. Dalam konteks pembelajaran, paling tidak bahasa koran/majalah bisa dijadikan cermin pemakaian bahasa sehari-hari yang dinamis dan dipakai masyarakat luas. Maka bagi para pengajar bahasa, cukup beralasan untuk menjadikan bahasa koran/majalah sebagai sumber ajar (materi ajar).

### **Daftar Rujukan**

- Anwar, Rosihan. (1991). *Bahasa Jurnalistik dan Komposisi*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. (1995). *Sosiolinguistik, Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, Parni. (1997). "Bahasa Koran yang Direndahkan". *Republika*, 16 Maret 1997.
- Heriyanto, Ariel. (1996). "Bahasa dan Kuasa: Tatapan Posmodernisme" dalam *Bahasa dan Kekuasaan* (Latif dan Ibrahim, ed.) Bandung: Mizan.
- Kleden, Ignas. (1978). "Eufimisme Bahasa, Konsensus Sosial, dan Kreativitas Kata". *Prisma*, Desember 1978 hlm. 67-72.
- Muhamad, Gunawan. (1991). "Bahasa Jurnalistik Indonesia" dalam *Pengetahuan Dasar Jurnalistik* (Wibisono, ed.) Jakarta: Media Sejahtera.



Mulyana, Deddy. (1999). *Nuansa-Nuansa Komunikasi, Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*. Bandung: Rosdakarya.

Strabhar, Joseph dan Robert La Rose. (1996). *Communication Media in the Information Society*. New York: Wadsworth Publishing Company and International Publishing Company.

*Tempo*, 17 November 2001

Wriston, Walter B. (1996). *The Twilight of Sovereignty*. Bandung: Remaja Rosdakarya

**Biodata Penulis**

**Dadang S. Anshori** adalah staf pengajar FPBS Universitas Pendidikan Indonesia, Pendidikan sarjana (S1) diselesaikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Kini sedang menempuh program magister (S2) Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran Bandung.